

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SDGs DESA DALAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA
(STUDI KASUS DESA RAMBIPUJI, KEC. RAMBIPUJI, KAB. JEMBER,
JAWA TIMUR)**

Disusun oleh:

NAMA : Suwarno
NPM : 2241021085
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

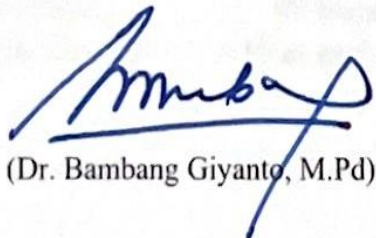
PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Suwarno
NPM : 2241021085
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Implementasi Kebijakan
SDGs Desa Dalam Percepatan
Pembangunan Desa: Studi Kasus
Desa Rambipuji
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Analysis of the Implementation of
Village SDGs Policies in Accelerating
Village Development: A Case Study
of Rambipuji Village

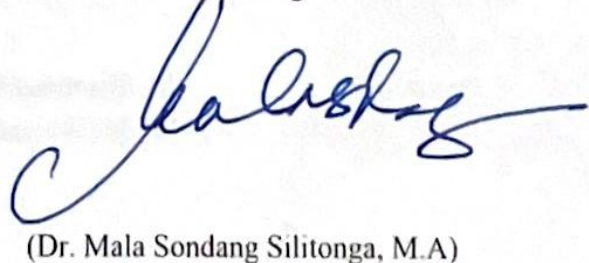
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Bambang Giyanto, M.Pd)

Pembimbing II



(Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A)

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : SUWARNO
NPM : 2241021085
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SDGS
DESA DALAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA: STUDI KASUS DESA
RAMBIPUJI

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Desember 2025
Pukul : 10.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP. MPA
Sekretaris : Dr. Neneng Sri Rahayu, ST. M.Si
Anggota : Dr. Hamka, MA
Pembimbing I : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd
Pembimbing II : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suwarno

NPM : 2241021085

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan SDGs Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hasil penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil **Plagiat atau Penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawaban sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan.

Jakarta, 17 Desember 2025

Peneliti,



Suwarno

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan SDGs Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Jember, Jawa Timur.”

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Kebijakan Publik, khususnya dalam bidang Kebijakan Pembangunan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai panduan strategis percepatan pembangunan desa di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd., dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta dedikasi telah membimbing penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan maupun implementasi kebijakan pembangunan desa.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurlia Nurdin, M.A., selaku Ketua STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Halim Iskandar M.Pd, selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2019-2024;

3. Bapak Harry Agustriono, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa, Kabupaten Jember;
4. Ibu Dwi Diah Setyorini, Kepala Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Jember;
5. Ibuku yang selalu mengalirkan doa untuk kebahagiaan putra-putrinya;
6. Istri tersayang dan anak-anakku yang selalu memberikan semangat dengan cara mereka masing-masing;
7. Rekan-rekan Mahasiswa MKP Angkatan 2022 STIA LAN Jakarta Kelas D, tuntaskan perjuangan ini;
8. Para sahabat dan semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini.

Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu kebijakan publik dan praktik pembangunan desa di Indonesia.

Jakarta, 17 Desember 2025

Peneliti,

Suwarno

ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan SDGs Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember)

Suwarno, Dr. Bambang Giyanto, M.Pd, Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A
suwarno@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Implementasi SDGs Desa di Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan kapasitas SDM desa, sinkronisasi data yang buruk, serta koordinasi antar-stakeholder yang belum optimal, sebagaimana tercermin dalam fakta sosial yang menunjukkan banyak desa kesulitan mencapai target energi bersih (SDG 7) dan ketangguhan iklim (SDG 13) akibat emisi GRK tinggi dari deforestasi dan BBM fosil. Di tengah isu tersebut, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berhasil meraih skor IDM tinggi dan menjadi desa percontohan, khususnya pada SDG 7 dan 13, menjadikannya role model pembangunan berkelanjutan. Penelitian kualitatif deskriptif ini menganalisis proses tersebut menggunakan kerangka George C. Edwards III. Temuan utama menunjukkan implementasi berjalan struktural-partisipatif melalui sinergi perangkat desa, masyarakat, dan lembaga, didukung struktur birokrasi jelas, komunikasi efektif, serta pengelolaan sumber daya terarah; namun, hanya 7 dari 18 target prioritas terealisasi, seperti desa tanggap iklim dan energi bersih. Faktor pendukung mencakup komitmen aparatur dan dana desa, sementara hambatan meliputi SDM terbatas dan komunikasi suboptimal. Penguatan dimensi Edwards III direkomendasikan untuk optimalisasi SDGs Desa secara nasional.

Kata kunci: *SDGs Desa, implementasi kebijakan, Desa Rambipuji, energi bersih, tanggap iklim*

ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Village SDGs Policies in Accelerating Village Development (A Case Study of Rambipuji Village, Rambipuji Subdistrict, Jember Regency)

Suwarno, Dr. Bambang Giyanto, M.Pd, Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A
suwarno@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract (English) Implementation of Village SDGs in Indonesia faces structural challenges such as limited village human resource capacity, poor data synchronization, and suboptimal inter-stakeholder coordination, as reflected in social facts showing many villages struggle to achieve clean energy targets (SDG 7) and climate resilience (SDG 13) due to high GHG emissions from deforestation and fossil fuels. Amid these issues, Rambipuji Village in Rambipuji Subdistrict, Jember Regency, successfully achieved high IDM scores and became a pilot village, particularly in SDG 7 and 13, positioning it as a role model for sustainable development. This qualitative descriptive study analyzes the process using George C. Edwards III's framework. Key findings indicate that implementation proceeds in a structural-participative manner through synergy among village officials, communities, and institutions, supported by clear bureaucratic structures, effective communication, and directed resource management; however, only 7 of 18 priority targets were realized, such as climate-responsive villages and clean energy initiatives. Supporting factors include apparatus commitment and village funds, while barriers encompass limited human resources and suboptimal communication. Strengthening Edwards III dimensions is recommended for national Village SDGs optimization.

Keywords: Village SDGs, policy implementation, Rambipuji Village, clean energy, climate resilience

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Tinjauan Kebijakan	41
C. Tinjauan Teoritis	53
1. Administrasi Publik.....	53
2. Kebijakan Publik.....	55
3. Implementasi Kebijakan Publik	57
D. Kerangka Berfikir.....	72
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	79
A. Metode Penelitian.....	79
B. Teknik Pengumpulan Data	79
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	84
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	87

A. Gambaran Umum	87
B. Hasil dan Pembahasan.....	106
1. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan SDGs Desa di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Jember	106
2. Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan SDGs Desa di Desa Rambipuji.....	161
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	166
A. Kesimpulan.....	166
B. Saran Perbaikan.....	167
DAFTAR PUSTAKA.....	169
LAMPIRAN.....	173

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024	7
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	81
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember Tahun 2024.....	88
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu dan Jenis Kelamin Kabupaten Jember Tahun 2024	89
Tabel 4.3 Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember Tahun 2024	98
Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	98
Tabel 4.5 Hasil olah data Word frequency proses implementasi SDGs Desa Rambipuji.....	108
Tabel 4.6 Analisis Komparatif Kekuatan dan Kelemahan Implementasi Kebijakan SDGs Desa di Desa Rambipuji.....	161
Tabel 4.7 Strategi Penguatan Implementasi SDGs Desa Berdasarkan Dimensi Implementasi	165

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 The Sustainable Development Goals.....	3
Gambar 1.2 SDGs Desa oleh Kementerian Desa PDTT	5
Gambar 1.3 Kesenjangan pembangunan Kota dan Desa	6
Gambar 1.4 Status IDM Desa Se-Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024.	9
Gambar 1.5 Rekap Jumlah Kabupaten Berdasarkan Status IDM Se-Jawa Timur (2022-2024)	10
Gambar 1.6 Hasil Rekap Nilai IDM (IKE, IKL dan IKS) di Kabupaten Jember (2022-2024)	10
Gambar 1.7 Skor SDGs Kabupaten Jember per Kecamatan Tahun 2025.....	11
Gambar 1.8 Skor SDGs Desa Rambipuji Tahun 2025	12
Gambar 2.1 Kerangka Teori Implementasi Kebijakan (Edwards III)	61
Gambar 2.2 Kerangka Teori Implementasi Kebijakan (Marilie S. Grindle).....	62
Gambar 2.3 Kerangka Teori Implementasi Kebijakan (Van Metter dan Van Horn).....	63
Gambar 2.4 Kerangka Teori Implementasi Kebijakan (Mazmanian dan Sabatier)	65
Gambar 2.5 17 Goals Konsep SDGs	67
Gambar 2.6 18 Tujuan SDGs Desa	72
Gambar 4.1 Distribusi Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Jember Tahun 2024	87
Gambar 4.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2020- 2024	91
Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember (persen), 2020-2024...	92
Gambar 4.4 Jumlah Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember, 2016- 2025	93

Gambar 4.5	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Jember 2016-2025	94
Gambar 4.6	Capaian Goals SDGs Desa Kabupaten Jember berdasarkan input data hasil Pendataan SDGs Desa Tahun 2021	97
Gambar 4.7	Hierarchy chart hasil olah data dimensi proses implementasi SDGs Desa Rambipuji	107
Gambar 4.8	Hasil pengolahan data World cloud terkait proses implementasi SDGs Desa Rambipuji.....	108
Gambar 4.9	Hierarchy chart olah data dimensi Struktur Birokrasi.....	110
Gambar 4.10	Salah satu Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh DPMD di setiap Kecamatan.....	111
Gambar 4.11	Realisasi anggaran desa.....	112
Gambar 4.12	Hierarchy chart olah data dimensi Komunikasi	118
Gambar 4.13	Sosialisasi desa Ramah perempuan dan anak Desa Rambipuji....	120
Gambar 4.14	Kegiatan sosialisai rencana program desa berdaya oleh kantor pemerintahan Desa Rambipuji	125
Gambar 4.15	Hierarchy chart olah data dimensi Sumber Daya	134
Gambar 4.16	Pelatihan pembuatan biogas dari limbah ternak dan industri tempe	141
Gambar 4.17	Program pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan desa rambipuji.....	142
Gambar 4.18	Hierarchy chart olah data dimensi Disposisi	147
Gambar 4.19	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Desa Rambipuji (Arsip Desa Rambipuji).....	151
Gambar 4.20	Salah satu program DPMD Jember dalam giat revitalisasi BUMDes di Kabupaten Jember (Instagram DPMD Jember)	152

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Diskursus tentang “membangun desa” bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak orde baru hingga saat ini arah kebijakan pemerintah tidak pernah melepaskan desa sebagai objek pembangunan. Mulai dari dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang “Pemerintahan Desa”; Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”; Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang “Pemerintah dan Pelaksanaan Otonomi Daerah”; Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang “Otonomi Desa” (Saputra dan Jaya., 2023). Apa kemudian yang membedakan dari semua regulasi tersebut? Adalah paradigma pembangunan yang digunakan oleh masing-masing periode pemerintahan mulai dari paradigma “membangun desa” menjadi “desa membangun”.

Kendatipun dua paradigma di atas terkesan mirip karena pilihan diksi yang digunakan secara terbalik, namun secara fundamental terdapat perbedaan konseptual yang mendalam. Paradigma “membangun desa” digunakan oleh orde baru dengan pendekatan *top down*, sehingga desa dipandang sebagai objek pasif yang diatur oleh pusat secara otoritatif, studi sebelumnya mengkategorikan sebagai model sentralistik (Sutoro., 2016). Sementara era reformasi menjadi titik tolak lahirnya paradigma baru “desa membangun” yang meletakkan desa sebagai subjek aktif dengan pendekatan *bottom up*, otonomi daerah menjadi oase atas kemandirian masyarakat desa dalam mengatur nasibnya sendiri, sebuah kebijakan yang mendekonstruksi secara radikal untuk mewujudkan desentralisasi pembangunan daerah (Eko dkk., 2018).

Puncaknya adalah UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang menjadi tonggak penting dalam pemberdayaan desa, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola sistem pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Dana desa yang dialirkan langsung dari APBN menjadi sumber

pembiayaan utama yang memungkinkan desa mengembangkan potensi lokal melalui partisipasi aktif masyarakat serta penguatan lembaga adat dan budaya setempat. Menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan arah pembangunan nasional yang lahir dari kesadaran atas potensi yang ada di desa. Sehingga narasi tentang membangun Indonesia dari desa bukan sekedar semboyan tanpa dasar konseptual yang kuat, melainkan dalam gagasan tersebut terdapat landasan teoritis baik secara filosofis, historis, sosilologis, dan politis.

Pembangunan desa di Indonesia memiliki peran krusial dalam mempercepat pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan besarnya populasi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 43% dari total penduduk Indonesia tinggal di desa-desa yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat nasional. SDGs Desa menjadi relevan dalam konteks pembangunan desa karena fokusnya yang komprehensif dan multi-dimensional. Pembangunan desa tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan. SDGs Desa mendorong pemerintah desa untuk memperhatikan kesejahteraan sosial, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi fokus utama, seperti upaya pelestarian sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan mitigasi perubahan iklim (Ramdani dan Resnawaty, 2021).

SDGs desa berangkat dari implementasi pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lahir sebuah agenda besar pada tahun 2015 dengan *consensus “The Future We Want”* dan “*Un Conference on Sustainable Development*” dalam siding PBB dengan target *goals* tahun 2030 (Kasinathan dkk., 2022). Dalam penelitian Kumar menjelaskan bahwa SGD ini merupakan transisi agenda global yang awalnya *Millenial Development Goals* (MDGs) tahun 2000 hingga beralih pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan tujuan menciptakan realitas kehidupan baru bagi masyarakat dunia yang

berkelanjutan (Kumar dkk., 2016). Agenda ini memuat 17 tujuan dengan 169 target yang bersifat saling terkait dengan menekankan prinsip *no one left behind*, sehingga pembangunan diharapkan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Gambar 1.1 The Sustainable Development Goals

Sumber: sdgs.un.org

Agenda tujuh belas poin sebagai target perubahan sosial oleh *United Nation* (PBB) dalam gambar di atas merupakan bentuk praktis atas wacana sampai tahun 2030 dengan pencapaian menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (Kasinathan dkk., 2022). SDGs yang tertuang dalam *Transforming Our World The 2030 Agenda for Sustainable Development* diadopsi oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai komitmen bersama untuk mengatasi tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, serta keadilan (UN, 2015).

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani agenda 2030 telah mengintegrasikan SGD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta membentuk Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor melalui pendekatan *whole of government* dan *whole of society* dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga komunitas lokal.

Konteks pembangunan desa menjadi krusial dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 penduduk Indonesia sebanyak 284.438 juta dengan jumlah desa lebih dari 83 ribu, dengan angka yang besar desa memiliki posisi strategis dalam mendukung tujuan pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berangkat dari peran strategis desa sebagai tonggak pembangunan nasional lahir sebuah kebijakan SDGs Desa, hal ini di dorong dari realitas bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di desa, serta kebijakan Dana Desa yang sejak 2015 memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Menteri Desa Abdul Halim Iskandar resmi meluncurkan konsep SDGs Desa sebagai bentuk lokalisasi dari 17 tujuan global SDGs agar lebih kontekstual dengan kebutuhan desa di Indonesia. Melalui pendekatan ini, SDGs Desa disusun menjadi 18 tujuan dengan tambahan satu tujuan khas, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif dengan tujuan untuk menguatkan tata kelola desa dan pelestarian budaya lokal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Iskandar, 2024). Implementasi SDGs kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang secara eksplisit menyatakan bahwa arah pembangunan desa harus mengacu pada pencapaian SDGs Desa seperti pada gambar dibawah ini.

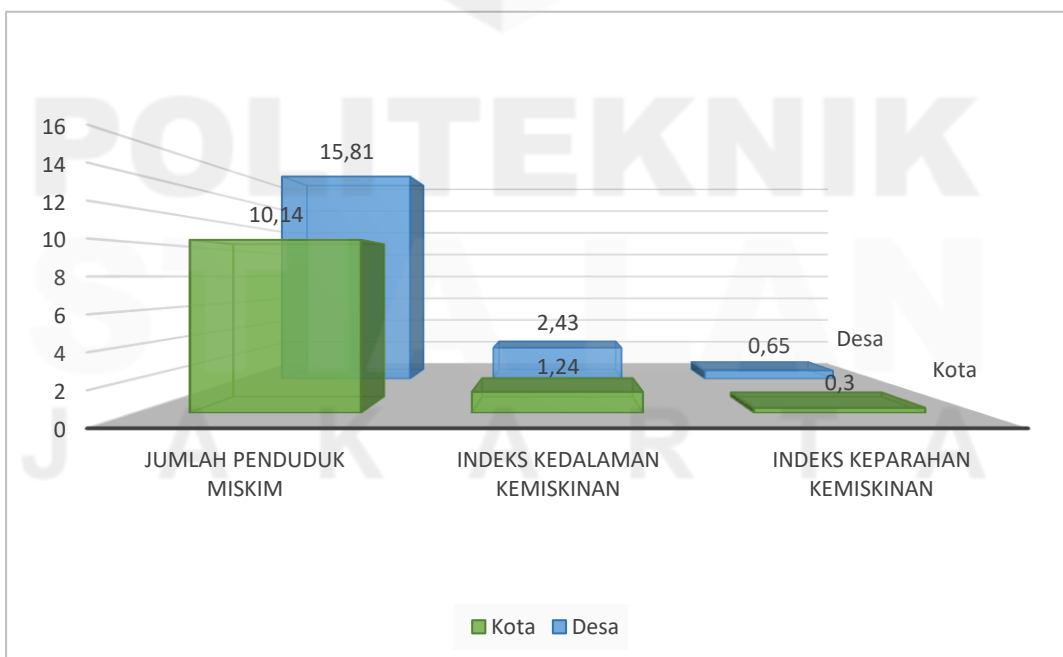


Gambar 1.2 SDGs Desa oleh Kementerian Desa PDTT

Sumber: Kementerian Desa, 2025

Dapat dilihat pada gambar diatas terdapat 18 prioritas percepatan pembangunan desa yang tertuang dalam konsep SDGs Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tujuan tersebut diantaranya: 1) desa tanpa kemiskinan; 2) desa tanpa kelaparan; 3) desa sehat dan sejahtera; 4) pendidikan desa berkualitas; 5) keterlibatan perempuan desa; 6) desa layak air bersih dan sanitasi; 7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; 8) pertumbuhan ekonomi desa merata; 9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; 10) desa tanpa kesenjangan; 11) kawasan permukiman desa aman dan nyaman; 12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; 13) desa tanggap perubahan iklim; 14) desa peduli lingkungan laut; 15) desa peduli lingkungan darat; 16) desa damai berkeadilan; 17) kemitraan untuk pembangunan desa, dan 18) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Dengan demikian, lahirnya SDGs Desa merupakan proses historis dari globalisasi agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam konteks lokal di Indonesia. SDGs Desa tidak hanya menjadi instrument perencanaan pembangunan desa yang selaras dengan agenda nasional dan global, tetapi juga menjadi pedoman untuk memperkuat kapasitas desa sebagai subjek pembangunan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Kendati demikian, pembangunan desa di Indonesia yang dilakukan pemerintah masih memiliki banyak tantangan sehingga pemerintah terlihat cenderung fokus pada wilayah perkotaan. Hal ini diakibatkan oleh fenomena kesenjangan pembangunan antara kota dan desa sehingga yang mengakibatkan gelombang urbanisasi semakin masif (Zuhro, 2024). Pada masa orde baru paradigma pembangunan Jawa sentris melahirkan demarkasi antara Jawa yang superior dan wilayah di luar Jawa yang inferior (Rezkie dan Yunani., 2023), sehingga dampak pembangunan wilayah pedesaan dengan kategori 3T; Terluar, terterdalam, dan terdepan cenderung ternegasikan (Sulthon et al., 2024). Realitas ini yang kemudian melahirkan kesenjangan antara desa dan kota, sebuah keterpautan yang menjadikan desa selalu melekat dengan keterbelakangan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis fakta mengejutkan tentang tingkat kemiskinan di Indonesia berada di Kawasan Desa per-Tahun 2020. Untuk melihat kesenjangan tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1.3 Kesenjangan pembangunan Kota dan Desa

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan paparan data BPS jika digambarkan keterpautan antara desa-kota masih jauh dari kata sejahtera. Misalnya jika dipersentasekan dari populasi

masayarakat di Indonesia pertahun 2020, jumlah penduduk miskin di kota (7,02%) sedangkan desa hampir separuh dari persentase kota dengan angka (13,20%) dikategorikan miskin. Para peneliti melakukan studi untuk mendalami problem kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Seperti Hafny Aisyatul Huda *dkk.*, (2020) yang turut merespon temuan BPS tersebut. Menurut Hafny kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh kesenjangan pembangunan antara wilayah yang memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat sehingga menjadi masalah serius. Beberapa indikator tersebut dapat dinilai berdasarkan aksesibilitas seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur yang tidak ditemukan di daerah pedesaan (Huda *dkk.*, 2020).

Pendapat Hany diperkuat oleh edaran Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang “Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024” (Huda et al., 2020). Kualifikasi daerah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Secara spesifik dalam Perpres tersebut di pasal 2 menjelaskan daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: a) Perekonomian masyarakat; b) Sumber daya manusia; c) Sarana dan prasarana; d) kemampuan keuangan daerah; e) aksesibilitas; dan f) karakteristik daerah. Sehingga pemerintah menetapkan terdapat 62 Kabupaten dari 11 Provinsi yang disebut Daerah tertinggal (Kementerian Desa., 2023). Daftar nama daerah berdasarkan Provinsi tertinggal dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

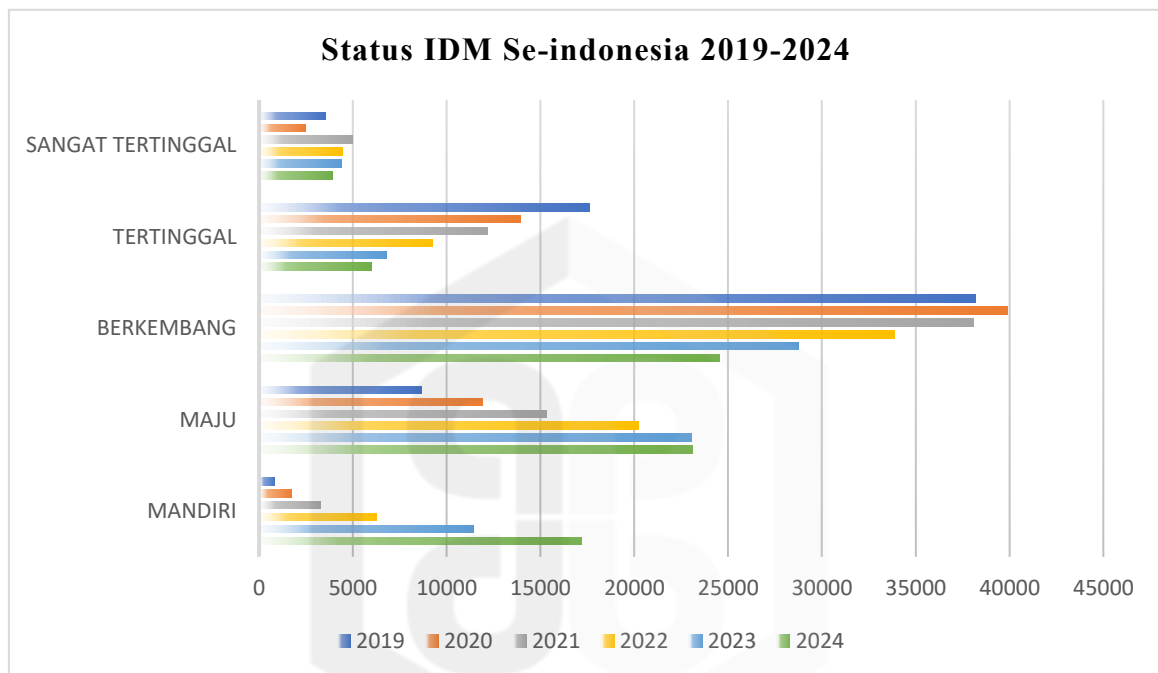
No	Nama Provinsi	Jumlah Kabupaten
1	Sumatera Utara	4
2	Sumatera Barat	1
3	Sumatera Selatan	1
4	Lampung	1
5	Nusa Tenggara Barat	1

6	Nusa Tenggara Timur	13
7	Sulawesi Tengah	3
8	Maluku	6
9	Maluku Utara	2
10	Maluku Barat	8
11	Papua	22

Sumber: Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020

Selain jumlah Kabupaten di 11 Provinsi sebagaimana edaran Perpres (Tabel 1.1), dalam peraturan tersebut di pasal 1 menyebutkan secara proporsional yang bertanggungjawab mengurus persoalan persoalan desa dan daerah tertinggal adalah Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menindak lanjuti hal ini Kemendes PDTT memberi klasifikasi yang lebih spesifik agar mudah menyikapi secara proporsional dan dilakukan advokasi secara berkelanjutan (*Sustainable*) agar pembangunan desa lebih terarah dan mudah diatasi. Kementerian Desa PDTT melakukan kategoriasasi desa menjadi lima status: Desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan desa mandiri (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022).

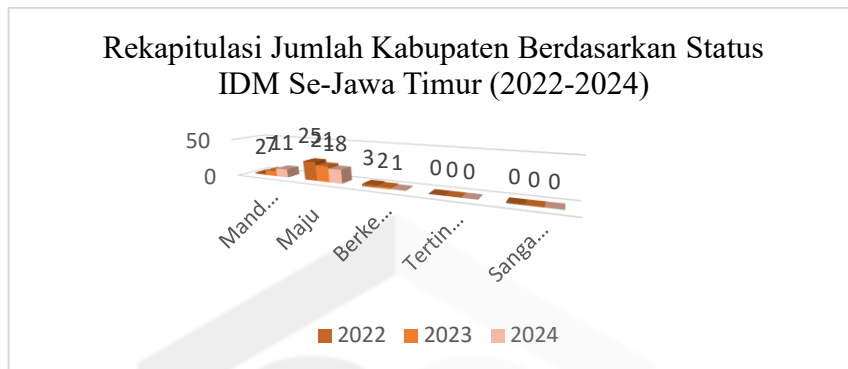
Keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan preferensi politiknya dalam membangun negara dimulai dari desa melalui Kementerian Desa PDTT mulai menunjukkan dampak positif. Pemerintah cukup serius untuk merealisasikan kebijakan ini, terlihat dari landasan hukum yang dibangun dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan Permendes No 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 6 ayat (2) a. pendataan desa, pemerataan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa (Permen Desa, PDTT: 2021). Kebijakan tersebut memberikan dampak positif berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun selama lima tahun terakhir (2019-2024) dalam gambar berikut:



Gambar 1.4 Status IDM Desa Se-Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024.

Sumber: Publikasi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa PDTT 2024

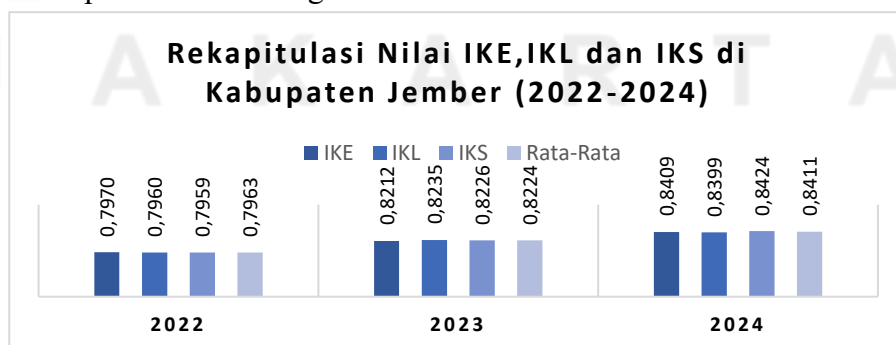
Berdasarkan data IDM, upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan desa mengalami perubahan yang signifikan. Indikator komponen untuk melihat peningkatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT, Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Pasal 3 bahwa indeks desa membangun merupakan komposit yang terdiri dari: a) Indeks *Ketahanan Sosial* (IKS); b) *Indeks Ketahanan Ekonomi* (IKE); c) dan *Indeks Ketahanan Lingkungan* (Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia: 2016). Ketiga indikator tersebut menjadi titik tolak kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja menjadi faktor yang fundamental. Salah satu pencapaian dalam pembangunan desa sangat dirasakan khususnya di Jawa Timur. Sejak tahun 2022 sampai 2024 provinsi Jawa Timur menjadi percontohan karena berstatus mandiri. Hal tersebut dibuktikan dengan status Kabupaten di Jawa Timur sudah tidak ada satupun kabupaten yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal sebagaimana dalam gambar berikut.



Gambar 1.5 Rekap Jumlah Kabupaten Berdasarkan Status IDM Se-Jawa Timur (2022-2024)

Sumber: Data diolah peneliti dari Publikasi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT 2024

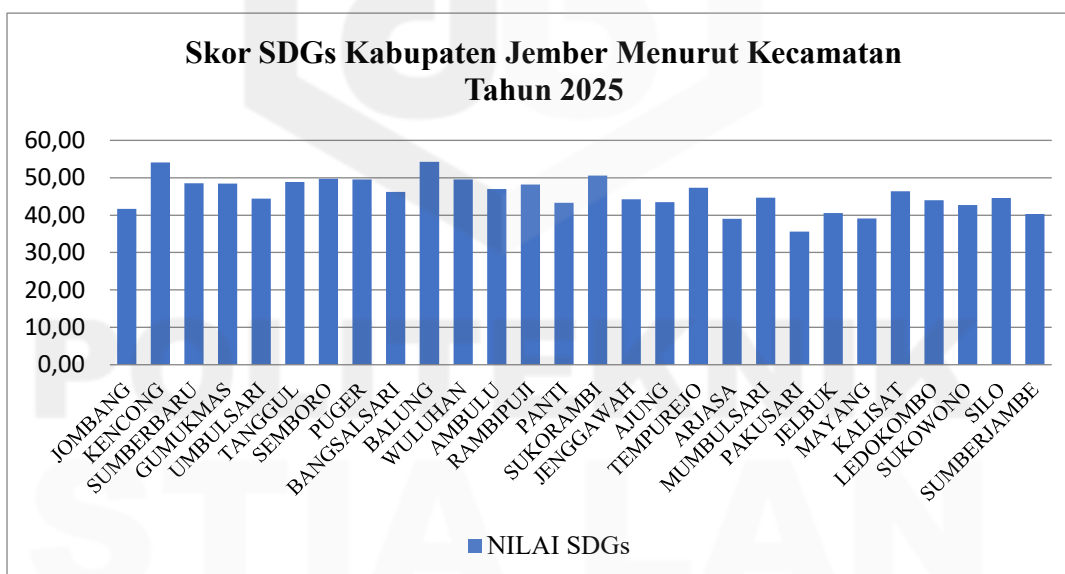
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir (2022-2024) terdapat tren positif peningkatan nilai IDM Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Pada tahun 2022 di Jawa Timur masih terdapat 2 Kabupaten yang berstatus mandiri namun pada tahun 2024 sudah memiliki sebelas kabupaten yang berstatus Mandiri. Kabupaten Jember menjadi salah satu yang mengalami peningkatan nilai IDM, pada tahun 2022 Jember masih berstatus Kabupaten yang maju, namun pada tahun 2023 dan 2024 sudah menjadi Kabupaten Mandiri. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari indikator komposit (Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan) yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.6 Hasil Rekap Nilai IDM (IKE, IKL dan IKS) di Kabupaten Jember (2022-2024)

Sumber: Data diolah peneliti dari Publikasi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan yang cukup signifikan pada Kabupaten Jember. Pada tahun 2022 rata-rata nilai indeks di dapati mencapai 0,76 dan meningkat ditahun 2023 dengan nilai rata-rata 0,82 serta kembali menguat pada tahun 2024 mencapai 0,84 yang artinya selama 3 tahun terakhir nilai komposit dari indeks desa membangun Kabupaten Jember mengalami kenaikan dan terdapat pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran pembangunan desa yang berada di Kabupaten Jember. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pembangunan yang didasarkan pada skor pencapaian SDGs pada masing-masing kecamatan seperti pada data dibawah ini.

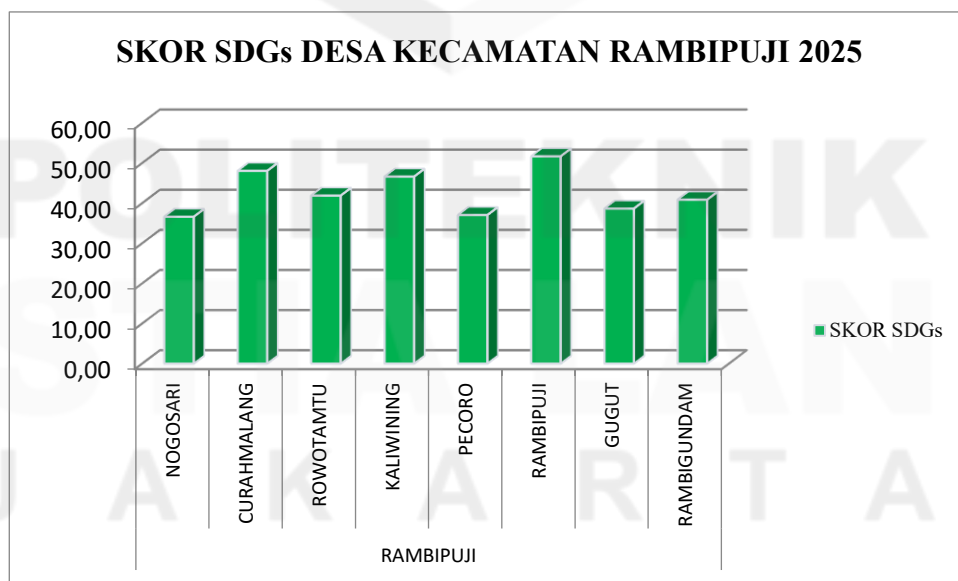


Gambar 1.7 Skor SDGs Kabupaten Jember per Kecamatan Tahun 2025

Sumber: Data diolah peneliti dari Publikasi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT 2024

Dapat dilihat dari data di atas bahwa tren peningkatan pembangunan pada Kabupaten Jember didorong oleh pembangunan desa dengan 18 tujuan SDGs yang diakumulasi pada tiap-tiap kecamatan hampir menyentuh 50%. Dari total 31 kecamatan terdapat 10 Kecamatan yang menyumbang tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Jember. Kecamatan Kencong mendapatkan skor (54,11); Balung (54,26); Sukorambi (50,57); Wuluhan (49,54); Semboro (49,73); Puger

(49,60); Tanggul (48,90); Gumukemas (48,48); Sumberbaru (48,54); Rambipuji (48,17). Berdasarkan sepuluh Kecamatan yang berhasil menyumbang skor SDG's tertinggi di Kabupaten Jember, Kecamatan Rambipuji merupakan salah satu kecamatan yang memiliki persentase rumah tangga dengan akses air bersih mencapai 92% pada tahun 2024 (Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember). Selain itu, Kecamatan Rambipuji dapat mengurangi Tingkat kemiskinan dari 15% (2020) menjadi 10% (2024) berkat program pemberdayaan ekonomi local dan Pendidikan Berkualitas dengan Angka partisipasi sekolah dasar mencapai 98%, dengan program beasiswa dan pelatihan guru yang ditingkatkan serta Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas berhasil mengurangi volume sampah hingga 30% dalam 3 tahun terakhir. Pencapaian yang dilakukan tak lekang oleh pembangunan yang dilakukan pemerintah desa yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.8 Skor SDGs Desa Rambipuji Tahun 2025

Sumber: Data diolah peneliti dari Publikasi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT 2024

Data diatas mengartikan bahwa pembangunan pada Kecamatan Rambipuji sangat disokong oleh pembangunan desa-desa terkhusus oleh desa Rambipuji. Desa Rambipuji memiliki capaian luar biasa pada indikator Desa Berenergi Bersih dan

Terbarukan dengan skor 99,93 persen, sebuah pencapaian yang mencerminkan keseriusan desa dalam mendorong transisi energi menuju sumber yang ramah lingkungan. Capaian ini sangat relevan jika dikaitkan dengan isu global tentang energi terbarukan yang menjadi salah satu pilar utama dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Saat ini, dunia menghadapi tantangan besar terkait krisis energi, perubahan iklim, dan ketergantungan terhadap energi fosil yang menyumbang emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, energi terbarukan tidak lagi hanya dipandang sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan bumi.

Dalam konteks global, transisi menuju energi bersih menjadi agenda prioritas yang ditekankan oleh PBB melalui SDG ke-7 (*Affordable and Clean Energy*), yang menargetkan akses universal terhadap energi terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Desa Rambipuji, dengan skor hampir sempurna pada indikator ini, menunjukkan bagaimana komitmen global tersebut dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa desa mampu menjadi aktor penting dalam menjawab tantangan global melalui kebijakan dan praktik tata kelola energi yang inklusif, inovatif, serta berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tantangan besar dalam implementasi SDGs di tingkat desa secara nasional yang masih relatif rendah, di mana hanya sebagian kecil desa yang berhasil mencapai target-target krusial seperti SDG 7 (Energi Bersih) dan SDG 13 (Tanggap Perubahan Iklim). Berdasarkan laporan Kemendes PDTT 2023, rata-rata skor Indeks Desa Membangun (IDM) nasional masih berada pada kategori mandiri potensial, mengindikasikan keterbatasan infrastruktur dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang menjadi hambatan utama. Desa Rambipuji, Kabupaten Jember, menjadi lokus penelitian yang sangat strategis karena menunjukkan pencapaian skor tinggi pada indikator SDG 7 dan 13, sehingga menawarkan data empiris yang langka dan berharga untuk dianalisis secara mendalam dalam konteks percepatan

pembangunan desa pasca-pandemi, terutama ketika emisi gas rumah kaca pedesaan justru meningkat. Eksplorasi ilmiah terhadap temuan di Desa Rambipuji diharapkan mampu menghasilkan model replikasi yang aplikatif bagi lebih dari 70.000 desa lain di Indonesia, mendukung target nasional Net Zero Emission 2060, sekaligus memberikan kontribusi penting dalam evaluasi optimalisasi kebijakan SDGs Desa, terutama mengingat alokasi dana desa tahunan sebesar Rp70 triliun yang sering kali belum dimanfaatkan secara maksimal. Meski terdapat pencapaian yang menonjol, masih banyak indikator lain di Desa Rambipuji yang menunjukkan nilai rendah, sehingga rata-rata skor SDGs desa ini baru mencapai 51,67% dan jauh dari kata optimal. Kondisi tersebut menegaskan kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian komprehensif yang tidak hanya menilai angka pencapaian, tetapi juga menggali faktor-faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan implementasi SDGs secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai penilaian Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Rambipuji, Kabupaten Jember, menjadi sangat penting karena hasil evaluasi terhadap 18 indikator SDGs menunjukkan bahwa implementasi SDGs di desa ini masih belum optimal secara keseluruhan. Dari hasil penilaian, terlihat bahwa sejumlah indikator memperoleh nilai tinggi seperti Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan (99,93), Desa Damai Berkeadilan (88,60), Desa Sehat dan Sejahtera (72,42), dan Pendidikan Desa Berkualitas (71,86). Namun, terdapat pula banyak indikator dengan nilai yang masih rendah, misalnya Desa Peduli Lingkungan Darat (1,90), Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan (9,29), Desa Tanggap Perubahan Iklim (21,43), serta Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata (26,53). Ketimpangan skor ini menandakan ketidakmerataan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan SDGs yang berpotensi menghambat tercapainya pembangunan desa secara berkelanjutan dan menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini sangat mendesak untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketimpangan tersebut serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas dan pemerataan implementasi SDGs di seluruh aspek pembangunan Desa Rambipuji, demi mewujudkan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini juga muncul dari adanya kekosongan dalam literatur sebelumnya yang didominasi oleh studi deskriptif umum tentang SDGs desa tanpa mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan multi-dimensi menurut George C. Edwards III. Sebagian besar studi cenderung menitikberatkan pada hambatan struktural tanpa membahas sinergi antara dimensi struktural, partisipatif, simbolis, dan komunikasi dalam konteks lokal yang spesifik seperti di Desa Rambipuji, di mana hanya 7 dari 18 target SDGs yang berhasil direalisasikan meskipun ada beberapa skor indikator yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan implementasi yang perlu dianalisis dari perspektif kompleksitas interaksi antara birokrasi desa, partisipasi masyarakat, budaya lokal, dan komunikasi kebijakan.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengaitkan teori George C. Edwards III dengan data empiris lapangan, sehingga menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dari proses implementasi SDG's di Desa Rambipuji sekaligus mengidentifikasi secara kritis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan SDGs. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam memahami kapasitas tata kelola desa secara mendalam, tetapi juga memberi nilai praktis sebagai basis rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mendukung transisi pembangunan berkelanjutan yang partisipatif dan adaptif. Desa Rambipuji dapat dipandang sebagai model mikro yang menggambarkan bagaimana sinergi antara dimensi implementasi kebijakan dapat mewujudkan keberhasilan SDGs di tingkat lokal, sekaligus memperkaya diskursus global tentang peran komunitas lokal dalam pembangunan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada kajian kritis untuk melihat implementasi kebijakan SDGs Desa dalam percepatan pembangunan Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Pembangunan desa melalui SDGs Desa merupakan upaya strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari tingkat lokal. Desa

Rambipuji sebagai lokus penelitian menunjukkan capaian signifikan, salah satunya indikator Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan dengan skor 99,93 persen, yang merefleksikan keseriusan dalam mendukung agenda global transisi energi. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan implementasi SDGs Desa secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola, pelaksanaan program, hingga partisipasi masyarakat yang berimplikasi terhadap efektivitas pembangunan desa. Dari hasil telaah dan analisis awal, permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya:

1. Ketidakseimbangan capaian antar indikator SDGs Desa. Walaupun Desa Rambipuji unggul pada sektor energi bersih, namun beberapa indikator lain seperti pengentasan kemiskinan (Data?), peningkatan kualitas pendidikan (Data?), serta penguatan ekonomi lokal masih menghadapi tantangan (Data?). Hal ini menunjukkan adanya disparitas capaian pembangunan desa yang berpotensi memperlambat pencapaian tujuan secara holistik.
2. Keterbatasan efektivitas implementasi kebijakan percepatan pembangunan desa. Meskipun Kementerian Desa, PDT telah merumuskan berbagai regulasi pendukung, mulai dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa No. 13 Tahun 2020, dan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 menunjukkan bahwa relasi di tingkat desa masih sering terhambat oleh komunikasi kebijakan yang tidak merata, lemahnya koordinasi birokrasi, serta kapasitas aparatur desa yang bervariasi.
3. Tantangan struktur dan kultur dalam tata kelola desa seperti mindset masyarakat yang masih menganggap semua program desa berbentuk BLT dan paradigma konservatif dalam menanggapi bencana alam secara tahayyul. Sehingga Implementasi program SDGs Desa masih dipengaruhi faktor budaya dan keyakinan masyarakat, tingkat partisipasi yang belum merata, serta kapasitas kepemimpinan desa dalam menginisiasi inovasi. Kondisi ini tentu mengindikasikan perlunya model tata kelola desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial.

4. Peran strategis namun kompleks dari pemerintah desa dan Kementerian Desa PDT. Sebagai penanggung jawab kebijakan dan pengelola dana desa, Kementerian Desa PDT memiliki kewajiban mengarahkan program agar tepat sasaran. Namun, pada tingkat implementasi, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pusat dan praktik di lapangan seperti kapasitas SDM khususnya terkait efektivitas penggunaan dana desa untuk prioritas pembangunan berkelanjutan, penurunan stunting, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan demikian, identifikasi masalah ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara capaian ideal SDGs Desa dengan realitas implementasi di Desa Rambipuji. Serta kondisi ini menegaskan pentingnya kajian mendalam mengenai bagaimana kebijakan SDGs Desa diimplementasikan, faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pembangunan desa.

C. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa isu yang sudah dijelaskan dalam identifikasi masalah menjadi basis utama peneliti untuk mengkaji secara holistik dan komprehensif. Atas dasar asumsi dan perspektif peneliti tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa implementasi kebijakan SDGs Desa di Desa Rambipuji tidak optimal?
2. Bagaimana strategi optimalisasi implementasi kebijakan SDGs Desa di Desa Rambipuji?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dijelaskan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan SDGs di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

2. Menyusun strategi optimalisasi implementasi kebijakan SDGs Desa di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan memiliki dua manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Manfaat tersebut sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis: Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan administrasi publik, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan di bidang SDGs Desa dalam percepatan pembangunan desa.
- 2) Manfaat Praktis: Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga khususnya Desa Rambipuji, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Lembaga terkait yang berhubungan dengan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan SDGs Desa di Desa Rambipuji melalui empat dimensi George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan pada jalur yang benar secara administratif, namun masih menghadapi tantangan substansial pada level operasional. Faktor penghambat paling dominan dalam implementasi kebijakan SDGs Desa di Desa Rambipuji ada pada dimensi disposisi (sikap pelaksana dan masyarakat) dan dimensi sumber daya terutama pada keterbatasan sumber daya manusia yang terinsitusi. Dari temuan di lapangan diketahui jika belum semua pelaksana dan masyarakat mempunyai keinginan untuk melakukan berbagai langkah dalam mencapai target-target tertentu SDGs di Desa Rambipuji. Disposisi masih bersifat parsial di mana implementasi SDGs Desa masih dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif dan sektoral (proyek), bukan sebagai visi pembangunan berkelanjutan yang holistik. Hal ini menyebabkan rendahnya komitmen internal dalam melaksanakan berbagai tahapan realisasi target-target SDGs Desa.

Situasi ini berkelindan dengan adanya keterbasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kuantitas, jumlah perangkat desa sebagai aktor utama pelaksana SDGs Desa masih relatif terbatas. Situasi ini diperparah dengan belum terdistribusinya beban kerja secara merata antar unit maupun aktor. Dari sisi kualitas masih muncul adanya ketergantungan dorongan pelaksanaan kebijakan dari faktor eksternal seperti peran pendamping desa maupun keterlibatan kalangan perguruan tinggi. Kondisi ini memicu kerentanan terhadap sustainability atau keberlanjutan program. Dari dimensi komunikasi juga diketahui adanya model komunikasi yang masih bersifat top down dan didominasi oleh elite desa, sehingga kelompok marjinal (buruh tani, lansia) hanya menjadi objek kebijakan tanpa keterlibatan aktif dalam ruang dialog emansipatif.

B. Saran Perbaikan

Sebagai upaya optimalisasi kebijakan SDGs Desa ke depan, berikut adalah rekomendasi strategis yang dapat diusulkan:

1. Reorientasi Disposisi melalui Internalisasi Nilai (Paradigm Shift)
 - a. Pemerintah Desa perlu melakukan internalisasi nilai SDGs melalui forum-forum non-formal (seperti pengajian, rembug dusun, atau kelompok tani) untuk menggeser pola pikir warga dari "penerima bantuan" menjadi "subjek pembangunan"
 - b. Memberikan insentif atau penghargaan bagi tingkat RW/Dusun yang berhasil mencapai indikator SDGs tertentu guna memicu kompetisi positif dan komitmen kolektif.
2. Penguatan Kapasitas Lokal (Institutionalizing Knowledge)
 - a. Exit Strategy Kemitraan: Setiap kolaborasi dengan Perguruan Tinggi atau dengan pendamping desa harus mewajibkan adanya transfer of knowledge kepada kader lokal secara terukur.
 - b. Desa harus memiliki "Kader Penggerak SDGs" yang tersertifikasi atau terlatih secara mandiri.
 - c. Perekrutan tenaga bantuan teknis atau pemanfaatan Karang Taruna sebagai unit pendukung digitalisasi data SDGs untuk mengurangi beban kerja perangkat desa yang terkonsentrasi pada satu bidang saja.
3. Demokratisasi Komunikasi dan Ruang Inklusi
 - a. Menciptakan "Ruang Dialog Inklusif" di luar Musdes formal yang lebih ramah bagi kelompok marjinal. Pendekatan jemput bola (*door-to-door*) dalam sosialisasi SDGs diperlukan untuk menjangkau warga yang memiliki keterbatasan akses informasi.
 - b. Transparansi data SDGs Desa harus disajikan dalam format yang lebih populer (infografis sederhana) agar masyarakat mudah memahami capaian dan kekurangan di desanya sendiri.

4. Adaptasi SOP Lokal

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang lebih spesifik mengenai tata kelola SDGs Desa di Rambipuji agar panduan pelaksanaan tidak lagi bersifat umum dan mampu menjawab dinamika lokal desa yang unik.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2011). *Public policy making* (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Anggraeni, F. M., Pranata, C. Y., Harrymanto, P., Fadhillah, G. A., & Hafizah, D. (2024). Pengaruh otonomi desa terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan CAUSA*, 7(9). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(11), 8616. <https://doi.org/10.3390/su15118616>
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Aryani, L., & Kusumaningrum, R. (2023). Socialization of the Village's Sustainable Development Goals (SDGs) program in determining the direction of village development in Karawang Regency. *Jurnal Panrita Abdi*, 7(3), 609–618.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2025). *Kabupaten Jember dalam angka*. BPS Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember menurut lapangan usaha*. BPS Kabupaten Jember.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2025). *Profil kemiskinan Maret 2025 Kabupaten Jember*. BPS Kabupaten Jember.
- Bappenas. (2024). *SDGs knowledge hub*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. (2024). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)*. DPMD Kabupaten Jember.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2018). *Desa membangun Indonesia*. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS).
- Fitriandari, M., & Winata, H. (2021). Manajemen pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(1), 1–13.
- Haugen, J. B., Link, J. S., Cribari, K., Bundy, A., Dickey-Collas, M., Leslie, H. M., ... & Agnalt, A. L. (2024). Marine ecosystem-based management: Challenges remain, yet solutions exist, and progress is occurring. *Npj Ocean Sustainability*, 3(1). <https://doi.org/10.1038/s44183-024-00041-1>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan desa berbasis smart village: Studi smart governance pada pelayanan prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6, 539–556.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu*. Gava Media.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *SDGs Desa: Panduan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa*. Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Buku panduan indeks desa membangun*. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Manual book: Indeks desa membangun tahun 2023*. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.
- Klemm, G. C., Kayanda, R., Kazoba, A., McCann, J., Nnally, L. P., & Dickin, K. L. (2022). Translating multisectoral nutrition policy into community practice: Participation of nutrition officers in Tanzania fosters effective

- collaborative strategies to improve child nutrition. *Current Developments in Nutrition*, 6(4). <https://doi.org/10.1093/cdn/nzac030>
- Mindarti, L. I. (2016). *Aneka pendekatan dan teori dasar administrasi publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Ramdani, J., & Resnawaty, R. (2021). Kolaborasi multi pihak pada program kampung iklim di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 191. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35152>
- Rezkie, L. S., & Yunani, A. (2023). Pengaruh dana desa dan pembangunan infrastruktur terhadap indeks desa membangun di Kecamatan Barabai. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 858.
- Santoso, S. I., & Rodiyah, I. (2024). Achievements and barriers in evaluating stunting prevention programs in Keboguyang Village, Indonesia. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1104>
- Saputra, D. W., & Jaya, R. (2023). Pembangunan desa berdasarkan capaian Indeks Desa Membangun (Studi komparasi: Desa berkembang dan desa mandiri di Kecamatan Tempuling Kabupaten). *Journal of Administration Studies*.¹
- Sellang, K. (2016). *Administrasi dan pelayanan publik antara teori dan aplikasinya*. Penerbit Ombak.²
- Sugiyono, A. (2000). Indikator peman³gunaan sektor tenaga listrik yang berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 1(3).
- Sulthon, A. H. A., Fauzan, B. L., Duta, A. A., et al. (2024). Desa Saradan sebagai pilot project konsep pilar smart village dengan mengembangkan transformasi teknologi untuk pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i1.776>
- Sutoro, E. (2016). *Manifesto pembaharuan desa*. APMD Press.
- Syafiie, I. K. (2020). *Ilmu administrasi publik*. Rineka Cipta.
- United Nations. (2015a). *The Millennium Development Goals report 2015*. United Nations.

United Nations. (2015b). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

Wahab, S. (1997). *Pengantar kebijakan publik*. Bina Aksara.

Zuhro, R. S. (2024, Januari). Era membangun dari desa. *Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/>



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A